



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 4 JUNI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemprov Raih Opini WTP



RIO/BE

RAIH WTP: Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Yuan Candra Djasin menyerahkan LHP BPK RI Atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 kepada Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

BENGKULU, BE - Bengkulu yang ke- I Masa Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas pengelolaan keuangan daerah tahun Anggaran 2017. Opini WTP yang diraih tersebut berdasarkan penyampaian Wakil Kepala BPK RI melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Candra Djasin SE MM Ak CPA saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Bengkulu terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017, pada rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi

Bengkulu yang ke- I Masa Persidangan ke-II tahun sidang 2018, di ruang Rapat Paripurna, Kamis (31/5) lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan sangat mengapresiasi kinerja BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga dapat meraih predikat opini WTP. Capaian predikat Opini WTP 2017 ini, sangat spesial bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimana sejak dua tahun terakhir, yaitu tahun 2015 dan 2016 yang hanya mampu meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Atas capaian ini, saya

memberikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pengelola keuangan daerah, juga semua pihak termasuk anggota Dewan provinsi yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang luar biasa," tegas Rohidin.

Prestasi ini ditegaskannya, tak lepas dari kerjasama dan kerja keras jajaran di seluruh Pemerintahan Provinsi Bengkulu, dalam keseriusan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Dirinya berharap, dengan diraihnya opini WTP ini, pengelolaan keuangan semakin baik, transparan, akuntabel, guna mencapai good and clean government.

"Capaian opini WTP ini dapat kita pertahankan pada tahun-tahun yang akan

datang dan secara kualitas betul-betul memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu ini," paparnya.

Dari hasil catatan BPK, Rohidin menegaskan tentu hal itu akan tetap ditindaklanjuti dari waktu 60 hari yang diberikan. Karena menurutnya, temuan itu banyak bersifat kualitatif. Termasuk pemprov yang menjadi pemegang saham utama Bank Bengkulu. Maka harus dibuat regulasi atau kesepakatan semua kabupaten/kota mendorong Bank Bengkulu menjadi sebuah keharusan. Meski demikian, pemprov akan tetap mempertahankan opini yang sudah didapatkan. Tentu caranya dengan memperkuat pejabatnya untuk selalu mengontrol semua kegiatan. Baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun telah selesai kegiatan.

"Kalau tim ini berkerja dengan sungguh-sungguh, data disajikan dengan lengkap, kalau ada temuan atau kesalahan cepat diperbaiki segera, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini dibutuhkan tim yang solid dan dukungan DPRD," ujar Rohidin.

Disisi lain, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri SSos mengatakan, opini yang telah didapatkan ini jangan sampai membuat lengah. Hingga mengharuskan nantinya opini WTP hilang. "Jangan sampai lengah, harus terus dipertahankan. Apa yang jadi rekomendasi harus sama-sama ditindaklanjuti," pungkas Ihsan. (151/PRW)